



**PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI RIAU**



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2024

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI RIAU**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI		i
DAFTAR TABEL		iii
DAFTAR GAMBAR		iv
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	4
	1.3 Maksud dan Tujuan	6
	1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II	GAMBARAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD PROVINSI RIAU	8
	2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Riau	8
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	11
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	21
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD PROVINSI RIAU	23
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	23
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	29
	3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Sekretariat DPRD Kab/Kota	33
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	33
	3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	33
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	35
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	35
	4.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	36
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	38
	Mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Sekretariat DPRD Provinsi Riau dalam 5 (lima) tahun	
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN	41
	Menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang menjadi acuan dalam perencanaan program kegiatan tahunan Sekretariat DPRD Provinsi Riau sampai dengan tahun 2024	



BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	64
	Mengemukakan indikator kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Riau yang secara langsung menunjukkan kinerja Sekretariat DPRD dalam 5 (lima) tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD	
BAB VIII	PENUTUP	65
	Berisikan kesimpulan ringkas terkait Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 dan berbagai harapan terhadap pelaksanaannya	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pegawai Negeri Sipil Sekretariat DPRD Provinsi Riau berdasarkan Jenis Kelamin	12
Tabel 2.2	Pegawai Negeri Sipil Sekretariat DPRD Provinsi Riau berdasarkan Golongan	12
Tabel 2.3	Pegawai Negeri Sipil Sekretariat DPRD Provinsi Riau berdasarkan Jabatan/Eselon	13
Tabel 2.4	Pegawai Negeri Sipil Sekretariat DPRD Provinsi Riau berdasarkan Tingkat Pendidikan	13
Tabel 2.5	Pegawai Negeri Sipil Sekretariat DPRD Provinsi Riau yang telah mengikuti Pelatihan Penjenjangan	13
Tabel 2.6	Tenaga Harian Lepas Sekretariat DPRD Provinsi Riau berdasarkan Jenis Kelamin	14
Tabel 2.7	Tenaga Harian Lepas Sekretariat DPRD Provinsi Riau berdasarkan Tingkat Pendidikan	14
Tabel 2.8	Sarana Prasarana Penunjang (Peralatan dan Perlengkapan) Sekretariat DPRD Provinsi Riau	15
Tabel 2.9	Sarana Prasarana Penunjang Responsif Gender Sekretariat DPRD Provinsi Riau	15
Tabel 2.10	Jumlah Anggota DPRD Provinsi Riau sesuai Partai Politik dan Jenis Kelamin Tahun 2019 - 2024	16
Tabel 2.11	Jumlah Anggota DPRD Provinsi Riau sesuai Kab/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2019 - 2024	16
Tabel 2.12	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Riau Periode Renstra 2019 - 2024	18
Tabel 2.13	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Riau Periode 2014 - 2019	19
Tabel 2.14	Data Fasilitas Produk Hukum Sekretariat DPRD Provinsi Riau Periode 2019 - 2024	20
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	26
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Riau terhadap Pencapaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	31
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Provinsi Riau	35
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Provinsi Riau	36
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	39
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024	46
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Riau yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	64



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	2
Gambar 1.2	Pola Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota serta Renja Perangkat Daerah	3
Gambar 2.1	Bagan Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021	11



BAB I

PENDAHULUAN

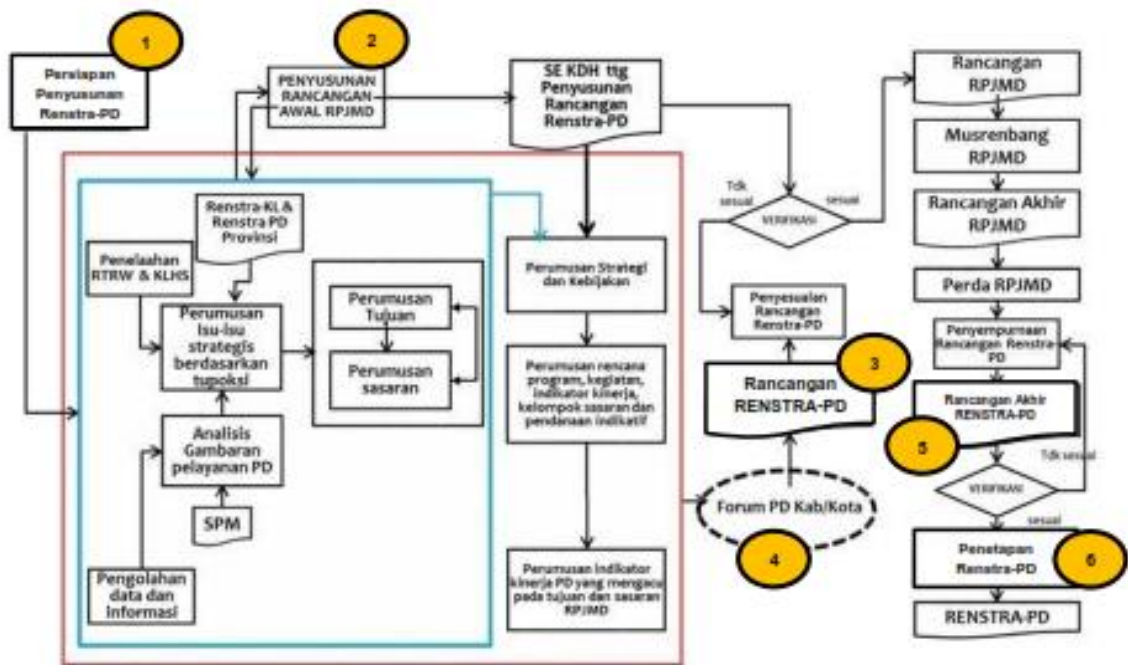
1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam mencapai tujuan bernegara. Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran dalam rangka pencapaian tujuan negara maka diperlukan suatu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Fungsi Rencana Strategis adalah Menjadi Pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD serta Instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Urusan. Renstra memuat serangkaian rencana program, kegiatan dan tindakan yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan dalam unit Satuan Unit Perangkat Daerah.

Dalam Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah terdapat 6 (enam) tahapan yakni: Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan, sebagaimana terdapat pada gambar berikut.



Gambar 1.1. Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

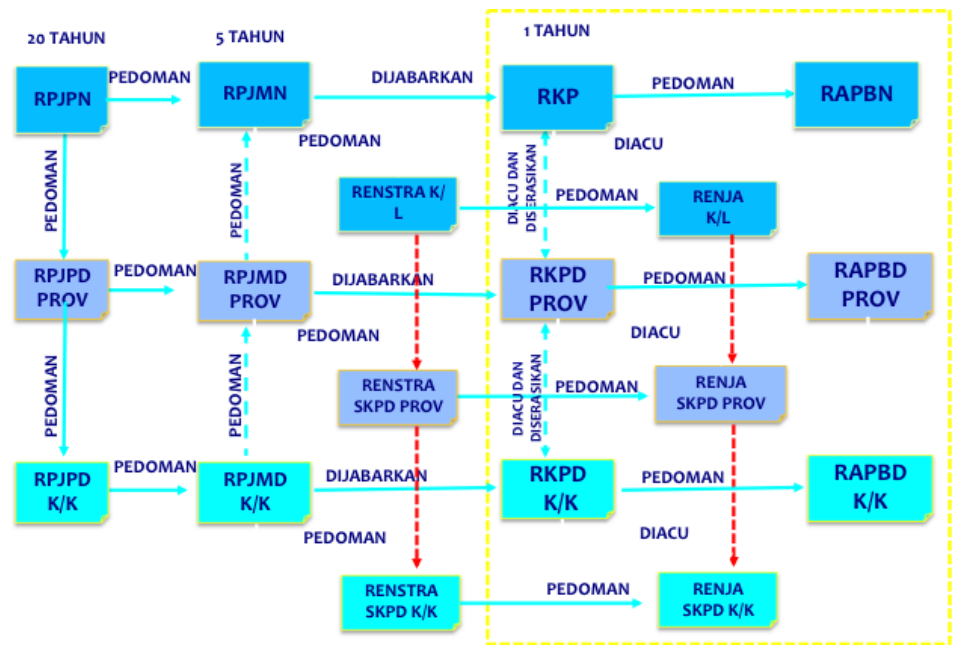
Dokumen Rencana Strategis ini dibuat sebagai pedoman bagi aparatur di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau sebagai arah kebijakan dalam melaksanakan aktivitas kegiatan serta untuk keseragaman pola berfikir dan bertindak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sehubungan dengan telah disusunnya RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau menindaklanjuti dengan menyusun Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau 2019-2024 sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau untuk periode 5 (lima) tahunan yang juga berpedoman pada RPJMD 2019-2024 tersebut, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan Daerah.

Berpijak pada upaya mewujudkan keterpaduan dan berkelanjutan pembangunan, Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau untuk menyempurnakan sinergitas Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada. Rencana Strategis memuat perubahan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program/kegiatan serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya yang dituangkan setiap tahunnya



dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau setiap tahunnya dan Hasil pelaksanaan Rencana Kerja tersebut akan dilaporkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahun.

Selanjutnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, alur sinkronisasi perencanaan penganggaran pusat dan daerah dalam satu kesatuan Sistem Informasi dan Manajemen Perencanaan Pembangunan Nasional (SIMRENAS) dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 1.2. Pola Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota serta Renja Perangkat Daerah

Setelah dilakukannya evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 maka disimpulkan dan direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Penyesuaian terhadap program dan kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang tertuang didalam Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2019-2024;
2. Penyesuaian terhadap indikator kinerja program dan kegiatan yang tertuang didalam Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2019-2024.

Untuk kesesuaian dan keselarasan antara RPJMD, RENSTRA, RENJA DAN APBD baik dari penetapan Program dan Kegiatan, Indikator Program dan Kegiatan hingga Pendanaan Indikatif maka, dipandang perlu untuk dilakukan Revisi Perubahan



Rencana Strategis guna tercapainya tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024 memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 11);
14. Peraturan Gubernur Riau Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau;
15. Peraturan Gubernur Riau Nomor 42 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Gubernur Riau Nomor 25 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 25);



1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau adalah untuk menentukan arah strategis Jangka Menengah Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan dengan pendekatan secara holistik-tematik, integrative dan berbasis spasial yang berdasarkan capaian kinerja Perangkat Daerah, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah guna mendukung atau mewujudkan visi misi Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

- 1. Merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah;
- 2. Merumuskan strategi & arah kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah guna mencapai target kinerja Program Prioritas RPJMD yang menjadi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 3. Merumuskan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif selama 5 (lima) Tahun;
- 4. Merumuskan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD PROVINSI RIAU
	2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Riau
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD PROVINSI RIAU
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah



- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- Telaahan Renstra K/L dan Renstra Sekretariat DPRD
- 3.3 Kab/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- Indikator Kinerja Utama Perangkat
- 4.2 Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Sekretariat DPRD Provinsi Riau dalam 5 (lima) tahun

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang menjadi acuan dalam perencanaan program kegiatan tahunan Sekretariat DPRD Provinsi Riau sampai dengan tahun 2024

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengemukakan indikator kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Riau yang secara langsung menunjukkan kinerja Sekretariat DPRD dalam 5 (lima) tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

Berisikan kesimpulan ringkas terkait Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 dan berbagai harapan terhadap pelaksanaannya

LAMPIRAN



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI RIAU

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

a. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Untuk menyelenggarakan tugasnya tersebut, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Penyelenggaraan fasilitasi rapat DPRD;
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun fungsi masing-masing struktur yang ada didalam Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris

- a. Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan pada bidang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.



- b. Untuk melaksanakan tugasnya Sekretaris DPRD mempunyai fungsi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, penyelenggaraan administrasi keuangan, fasilitasi penyelenggaraan rapat, penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Kepala Bagian Umum

- a. Kepala Bagian Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Umum dan Protokol, Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, dan Subbagian Hubungan Masyarakat dan Perpustakaan;
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Bagian umum mempunyai fungsi:
 - 1) Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bagian Umum;
 - 2) Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bagian Umum;
 - 3) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- c. Dalam pelaksanaan tugas Kepala Bagian Umum dibantu oleh :
 - 1) Subbagian Umum dan Protokol
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional

3. Kepala Bagian Persidangan dan Produk Hukum

- a. Kepala Bagian Persidangan dan Produk Hukum mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Rapat dan Risalah, Subbagian Produk Hukum, dan Subbagian Komisi, Fraksi dan Hubungan antar Lembaga;
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bagian Persidangan dan Produk Hukum menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bagian Persidangan dan Produk Hukum;



- 2) Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bagian Persidangan dan Produk Hukum;
 - 3) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- c. Dalam pelaksanaan tugas Kepala Bagian persidangan dan produk hukum dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Bagian Keuangan dan Perencanaan

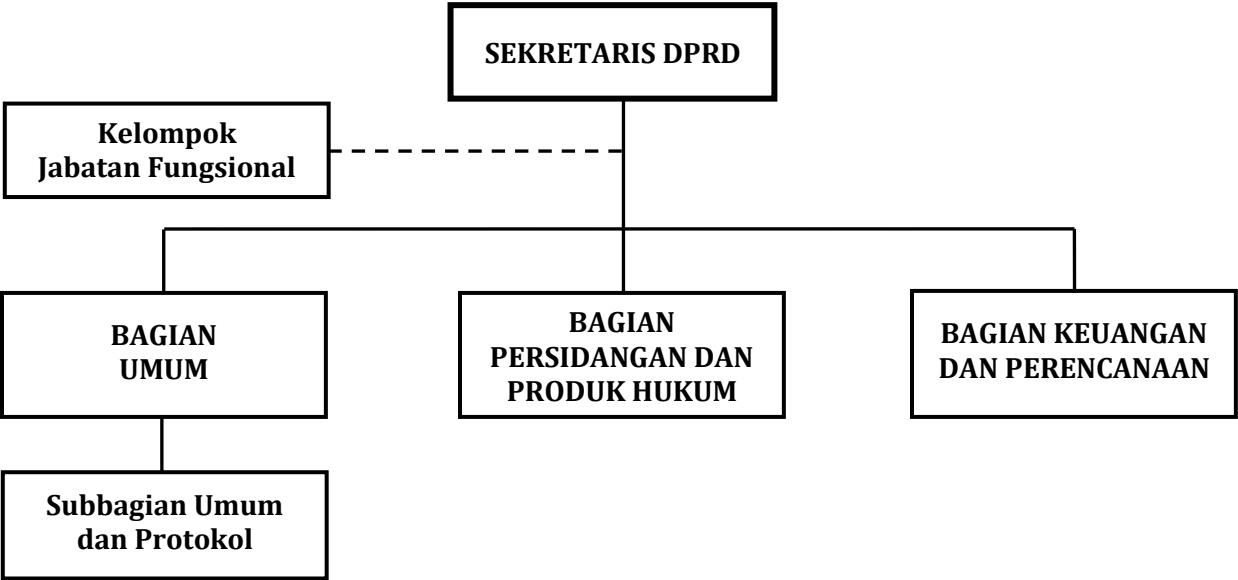
- a. Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Perencanaan, Subbagian Keuangan dan Perjalanan Dinas, dan Subbagian Verifikasi dan Pelaporan.;
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai fungsi :
 - 1) Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bagian Keuangan dan Perencanaan;
 - 2) Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bagian Keuangan dan Perencanaan;
 - 3) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- c. Dalam pelaksanaan tugas Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan prinsip-prinsip pembentukan perangkat daerah antara lain urusan yang dimiliki, karakteristik, potensi, kebutuhan, kemampuan serta visi dan misi daerah, dipandang perlu untuk membentuk, mengatur dan menata kembali susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Riau dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan



Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau. Adapun bagan struktur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar 2.1. Bagan Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau perlu didukung oleh sumber daya aparatur yang handal dan profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna meningkatkan pelayanan dan dukungan kepada Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan jumlah Pegawai sebanyak 196 (seratus sembilan puluh enam) orang dan Tenaga Harian Lepas sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) orang , dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin

Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau berjumlah 201 Orang, Jika dilihat berdasarkan Jenis Kelamin maka 127 Orang berjenis kelamin Laki-laki sedangkan 74 Orang berjenis kelamin Perempuan.



Tabel 2.1
Pegawai Negeri Sipil Sekretariat DPRD Provinsi Riau
berdasarkan Jenis Kelamin

No.	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	Laki - Laki	127 Orang
2.	Perempuan	74 Orang
	J U M L A H	201 Orang

Sumber Data : Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Riau per 31 Mei 2022

2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan

Bila diklasifikasikan kedalam tingkatan golongan, maka sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1, Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau terbanyak berada pada golongan III, atau sejumlah 124 orang dari jumlah pegawai secara keseluruhan.

Tabel 2.2
Pegawai Negeri Sipil Sekretariat DPRD Provinsi Riau
berdasarkan Golongan

No.	GOLONGAN	JUMLAH
1.	Golongan IV	19 Orang
2.	Golongan III	124 Orang
3.	Golongan II	57 Orang
4.	Golongan I	1 Orang
	J U M L A H	201 Orang

Sumber Data : Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Riau per 31 Mei 2022

3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatan/eselon

Dari 201 orang pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, terdapat 1 orang dengan jabatan eselon II, yaitu Sekretaris DPRD Provinsi Riau; 3 orang dengan jabatan eselon III yang terdiri dari 3 orang Kepala Bagian, serta 1 orang dengan jabatan eselon IV yang terdiri dari 1 orang Kepala Sub Bagian dan sisanya sebanyak 196 orang adalah staf.



Tabel 2.3
Pegawai Negeri Sipil Sekretariat DPRD Provinsi Riau
Berdasarkan Jabatan/Eselon

No.	JABATAN/ESELON	JUMLAH
1.	Eselon II	1 Orang
2.	Eselon III	3 Orang
3.	Eselon IV	1 Orang
4.	Staf/Non Struktural	196 Orang
	J U M L A H	201 Orang

Sumber Data : Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Riau per 31 Mei 2022

4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jika melihat pada tingkat pendidikan aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, maka komposisi pegawai dengan pendidikan Strata 1 yang terbanyak yaitu berjumlah 94 dari jumlah pegawai secara keseluruhan. Hal ini mencerminkan sumber daya aparatur yang cukup dan terus ditingkatkan.

Tabel 2.4
Pegawai Negeri Sipil Sekretariat DPRD Provinsi Riau
berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Strata 2	30 Orang
2.	Strata 1	92 Orang
3.	Diploma 3	8 Orang
4.	SMA/SMK/D.I/D.II	70 Orang
5.	Sekolah Menengah Pertama	1 Orang
	J U M L A H	201 Orang

Sumber Data : Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Riau per 31 Mei 2022

Selain jenjang pendidikan formal, dalam kaitannya untuk penjenjangan jabatan aparatur, sebagian pegawai telah mengikuti pelatihan penjenjangan dimulai dari Diklatpim IV sampai dengan Diklatpim II.

Tabel 2.5
Pegawai Negeri Sipil Sekretariat DPRD Provinsi Riau yang telah mengikuti Pelatihan Penjenjangan

NO.	PELATIHAN PENJENJANGAN	JUMLAH
1.	Diklatpim II	-
2.	Diklatpim III	11 Orang
3.	Diklatpim IV	29 Orang
	J U M L A H	40 Orang



Sumber Data : Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Riau per 31 Mei 2022

Pada Tabel 2.4. terlihat bahwa untuk pelatihan penjenjangan yang terbanyak telah diikuti adalah Diklatpim IV, yang telah diikuti 27 orang pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dari jumlah secara keseluruhan.

4. Jumlah Tenaga Harian Lepas berdasarkan Jenis Kelamin

Jika melihat pada Jenis Kelamin, maka Tenaga Harian Lepas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berjenis kelamin laki-laki berjumlah 55 Orang, sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 66 Orang.

Tabel 2.6
Tenaga Harian Lepas Sekretariat DPRD Provinsi Riau
berdasarkan Jenis Kelamin

No.	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	Laki - Laki	109 Orang
2.	Perempuan	62 Orang
J U M L A H		171 Orang

Sumber Data : Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Riau per 31 Mei 2022

5. Jumlah Tenaga Harian Lepas berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jika melihat pada tingkat pendidikan Tenaga Harian Lepas, maka komposisi THL dengan pendidikan Strata 1 yang terbanyak yaitu berjumlah 41 orang dari jumlah THL secara keseluruhan.

Tabel 2.7
Tenaga Harian Lepas Sekretariat DPRD Provinsi Riau
berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Strata 2	3 Orang
2.	Strata 1	86 Orang
3.	Diploma 3	12 Orang
4.	SMA/SMK/D.I/D.II	70 Orang
J U M L A H		171 Orang

Sumber Data : Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Riau per 31 Mei 2022

b. Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dalam kaitannya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau didukung oleh Fasilitas Penunjang (Perlengkapan/Peralatan) seperti Komputer, Printer, Perangkat



Teknologi Informasi, Mesin Scanner dan Fotocopy, Kendaraan dinas, Ruang Kerja dan khusus untuk pejabat struktural Eselon II dan III disediakan kendaraan dinas dan lain sebagainya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Daftar Inventaris Kantor pada Lampiran 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.8
Sarana Prasarana Penunjang (Peralatan dan Perlengkapan)
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau

NO	NAMA BARANG	JUMLAH (DALAM BIDANG / UNIT / BUAH)	
1	Tanah	5	Bidang
2	Peralatan dan Mesin	17173	Unit
3	Gedung/Bangunan	21	Unit
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	224	Buah
5	Aset Tetap Lainnya	1967	Buah
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1	Unit

Sumber Data : Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Riau per 31 Mei 2022

Selain itu Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilengkapi dengan Sarana sarana prasarana penunjang responsif gender sebagai upaya terwujudnya kesetaraan gender, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut :

Tabel 2.9
Sarana Prasarana Penunjang Responsif Gender
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau

NO	Fasilitas	Jumlah
1	Toilet	32 Toilet Pria 32 Toilet Wanita
2	Tangga	6 Tangga dengan Pagar/Railing/Pegangan
3	Ruang Menyusui	1 Unit
4	Ruang Penitipan/Bermain Anak	1 Unit
5	Ruang Tunggu Tamu	1 Unit

Sumber Data : Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Riau per 31 Mei 2022

c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Provinsi Riau. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau beranggotakan 65 Orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Pimpinan DPRD Provinsi Riau terdiri dari 1 (satu)



Orang Ketua dan 3 (tiga) Orang Wakil Ketua yang berasal dari Partai Politik dengan jumlah kursi terbanyak. Jumlah Anggota DPRD Provinsi Riau saat ini berdasarkan Partai Politik dan Kota/Kabupaten adalah sebagai berikut :

Tabel 2.10
Jumlah Anggota DPRD Provinsi Riau sesuai Partai Politik dan Jenis Kelamin Tahun 2019 - 2024

Partai Politik	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Partai Demokrat	8	1	9
Partai Golongan Karya	6	5	11
Partai Hati Nurani Rakyat	8	2	10
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	7	2	9
Partai Gerakan Indonesia Raya	7	0	7
Partai Amanat Nasional	6	1	7
Partai Nasdem	6	0	6
Partai Kebangkitan Bangsa	3	3	6
Partai Keadilan Sejahterah	8	1	9
Partai Bulan Bintang	6	5	11
Partai Persatuan Pembangunan	8	2	10
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	7	2	9
Provinsi Riau	53	12	65

Tabel 2.11
Jumlah Anggota DPRD Provinsi Riau sesuai Kab/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2019 - 2024

Kab/Kota	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Indragiri Hulu - Kuantan Singingi	8	0	8
Indragiri Hilir	6	2	8
Pelalawan - Siak	5	3	8
Kampar	7	1	8
Rokan Hulu	5	1	6
Bengkalis - Kep. Meranti - Dumai	7	4	11
Pekanbaru	7	2	9
Rokan Hilir	6	1	7
Provinsi Riau	53	12	65



2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja adalah tingkat pelaksanaan tugas yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau sebagai fasilitator dari tugas pokok dan fungsi DPRD ukuran keberhasilan kinerjanya berdasarkan tingkat keberhasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya.

Pengukuran pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau diukur melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan yaitu Indeks Kepuasan Layanan.

Adapun capaian kinerja pelayanan serta Anggaran dan Realisasi Pendanaan Sekretariat DPRD Provinsi Riau periode Renstra 2019 - 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.12 dan 2.13 dibawah ini



Tabel 2.12
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Riau
Periode Renstra 2019 - 2024

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(18)	(19)	(20)	(19)	(20)
1	Indeks Kepuasan Layanan				72	73	74	75	76	73,5	74,01	75,02	-	-	102	101	101	-	-



Tabel 2.13
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Riau
Periode 2019 - 2024

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	286.214.672.600	295.829.296.674	-	-	-	276.077.666.154	283.619.999.762	-	-	-	96,46	95,87	0,00	0,00	0,00	116.408.793.855	111.939.533.183
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	32.779.318.998	21.798.310.195	-	-	-	29.998.546.343	20.694.114.212	-	-	-	91,52	94,93	0,00	0,00	0,00	10.915.525.839	10.138.532.111
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	9.643.741.440	16.220.738.000	-	-	-	4.824.657.422	12.945.342.933	-	-	-	50,03	79,81	0,00	0,00	0,00	5.172.895.888	3.554.000.071
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	276.352.000	-	-	-	-	180.292.000	-	-	-	-	65,24	0,00	0,00	0,00	0,00	55.270.400	36.058.400
Program Pengembangan Data / Informasi	96.480.000	-	-	-	-	95.200.000	-	-	-	-	98,67	0,00	0,00	0,00	0,00	19.296.000	19.040.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	234.000.000	-	-	-	-	213.079.900	-	-	-	0,00	91,06	0,00	0,00	0,00	46.800.000	42.615.980
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	-	155.349.564.701	152.208.765.772	-	-	-	137.741.863.658	-	-	0,00	0,00	88,67	0,00	0,00	61.511.666.095	27.548.372.732
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	-	-	282.784.703.743	239.787.035.340	-	-	-	250.383.901.040	-	-	0,00	0,00	88,54	0,00	0,00	104.514.347.817	50.076.780.208



Tabel 2.14
Data Fasilitas Produk Hukum Sekretariat DPRD Provinsi Riau
Periode 2019 - 2024

No	Uraian	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah		
		2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan	11	10	16
2	Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas	9	3	7



2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bagian ini membahas mengemukakan hasil analisis Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, hasil telaahan terhadap RTRW dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Sekretariat DPRD Provinsi Riau tidak membahas hasil analisis Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, hasil telaahan terhadap RTRW dan hasil terhadap KLHS dikarenakan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Riau tidak berkaitan langsung dengan hal tersebut.

Namun demikian, ke depan terdapat tantangan yang terkait dengan pengembangan pelayanan dan akuntabilitas kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau antara lain:

1. Perlu adanya perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) dari hasil rapat-rapat penyusunan rencana strategis 2019-2024 di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Riau serta hasil konsultasi penyusunan *cascading* ke KEMENPAN RB.
2. Perlunya target kinerja yang terukur serta rasional dan proposional dalam kaitannya dengan pelayanan tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD, sehingga memberikan *feedback* positif terhadap kinerja Lembaga DPRD.
3. Besarnya tuntutan profesionalisme aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.
4. Perlunya optimalisasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, serta evaluasi kinerja.



Melihat permasalahan/tantangan tersebut di atas, terdapat peluang bagi Sekretariat DPRD Provinsi Riau untuk peningkatan kualitas pelayanan tugas dan fungsi Lembaga DPRD Provinsi Riau ke depan yaitu:

1. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata tertib Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau sebagai pedoman tugas pelayanan dan dukungan administratif bagi Sekretariat DPRD;
2. Adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dapat dijadikan dasar dan acuan penyusunan rencana kinerja pelayanan Sekretariat DPRD;
3. Penerapan dan pengembangan SOP di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Riau sebagai pendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengemban tugas dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat Strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh perkembangan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas dua faktor Strategis, yaitu kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), serta berupa lingkungan eksternal organisasi yang terdiri atas dua faktor Strategis, yaitu peluang (*opportunity*) dan ancaman / tantangan (*threat*), pendekatan ini juga dikenal dengan sebutan SWOT.

Mengenai kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threat*) dalam menjalankan pelayanan dan dukungan kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Riau bisa digambarkan melalui pelayanan penyelenggaraan kegiatan kedewanan yang menjadi bidang tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan dan isu-isu strategis yang terkait proses demokratisasi dan desentralisasi serta pesatnya perkembangan teknologi informasi sebagai dinamika kompleks dalam penyelenggaraan pemerintah daerah pada umumnya.

Dinamika tersebut telah berdampak pada (1) makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik, (2) meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) antara lain transparansi, akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik, ketaatan pada hukum dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan ilustrasi diatas, maka dapat digambarkan kondisi organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau kedepan yang terdiri atas kondisi internal dan eksternal sebagai berikut :

1. Kondisi internal yang terdiri atas kekuatan dan kelemahan :

a. Kekuatan (*Strengths*)

Pada sisi kekuatan terdapat faktor-faktor strategis antara lain :



- 1) Eksistensi Sekretariat DPRD kedudukannya semakin baik dan strategis melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Terjalannya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan anggota DPRD;
- 3) Tersedianya dukungan anggaran yang cukup memadai dan;
- 4) Tersedianya Tata Tertib DPRD berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

b. Kelemahan (*Weaknesses*)

Pada sisi kelemahan terdapat faktor-faktor strategis antara lain :

- 1) Belum optimalnya sumber daya aparatur Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas pelayanan dan dukungan yang baik, profesional dan handal serta mampu mendeteksi dini terhadap perubahan-perubahan yang terjadi;
- 2) Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- 3) Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia;
- 4) Belum tersedianya juknis/prosedur pelayanan dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas-tugas Pimpinan dan Anggota DPRD.

2. Kondisi eksternal yang terdiri atas peluang dan tantangan :

a. Peluang (*Opportunities*)

Pada sisi peluang terdapat faktor-faktor strategis antara lain :

- 1) Tingginya standar pelayanan dan dukungan yang dibutuhkan anggota DPRD;
- 2) Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis;
- 3) Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah;
- 4) Semakin pesatnya perkembangan teknologi informatika untuk peningkatan aksesibilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta informasi publik;
- 5) Dimungkinkannya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD.

b. Tantangan / Ancaman (*Threats*)

Pada sisi tantangan/ancaman, terdapat faktor-faktor strategis antara lain :



- 1) Perubahan instrumen penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sering berubahnya peraturan-peraturan dari pemerintah pusat;
- 2) Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD;
- 3) Masih banyaknya hambatan-hambatan internal dan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD.

Berdasarkan hasil analisis SWOT diatas, dapat diketahui bahwa kekuatan yang dimiliki Sekretariat DPRD Provinsi Riau yaitu Eksistensi Sekretariat DPRD kedudukannya semakin baik dan strategis melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan anggota DPRD, tersedianya dukungan anggaran yang cukup memadai dan tersedianya Tata Tertib DPRD berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD. Sedangkan kelemahan yang ada pada Sekretariat DPRD Provinsi Riau yaitu belum optimalnya sumber daya aparatur Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas pelayanan dan dukungan yang baik, profesional dan handal serta mampu mendeteksi dini terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia, dan belum tersedianya juknis/prosedur pelayanan dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas-tugas Pimpinan dan Anggota DPRD.

Namun Sekretariat DPRD Provinsi Riau selalu memiliki peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepada Lembaga DPRD Provinsi Riau yaitu tingginya standar pelayanan dan dukungan yang dibutuhkan anggota DPRD, tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis, semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah, semakin pesatnya perkembangan teknologi informatika untuk peningkatan aksesibilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta informasi public dan dimungkinkannya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD. Sedangkan tantangan/ ancaman yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD Provinsi Riau adalah perubahan instrumen penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sering berubahnya peraturan-peraturan dari pemerintah pusat, masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD, masih banyaknya



hambatan-hambatan internal dan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD.

Permasalahan merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan disusun. Untuk menentukan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, maka disusun pemetaan permasalahan yang terdapat di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Riau sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
(1)	(2)	(3)		(4)	
1.	Belum optimalnya pelayanan administrasi terhadap pelaksanaan fungsi legislasi Lembaga DPRD	1.1	Pelayanan administrasi terhadap pelaksanaan fungsi legislasi Lembaga DPRD yang tidak mencapai target dan tidak tepat waktu	1.1.1	Rendahnya kompetensi dan profesionalisme aparatur;
		1.2	Penyelenggaraan tata laksana layanan tugas-tugas fungsi legislasi yang belum optimal	1.2.1	Belum tersedianya pedoman/ juknis tata laksana layanan tugas legislasi Lembaga DPRD
2.	Belum optimalnya pelayanan administrasi terhadap pelaksanaan fungsi anggaran Lembaga DPRD	2.1	Pelayanan administrasi terhadap pelaksanaan fungsi anggaran Lembaga DPRD yang tidak mencapai target dan tidak tepat waktu	2.1.1	Rendahnya kompetensi dan profesionalisme aparatur;
		2.2	Penyelenggaraan tata laksana layanan tugas-tugas fungsi anggaran yang belum optimal	2.2.1	Belum tersedianya pedoman/ juknis tata laksana layanan tugas anggaran Lembaga DPRD
3.	Belum optimalnya pelayanan administrasi terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan Lembaga DPRD	3.1	Pelayanan administrasi terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan Lembaga DPRD yang tidak mencapai target dan tidak tepat waktu	3.1.1	Rendahnya kompetensi dan profesionalisme aparatur;
		3.2	Penyelenggaraan tata laksana layanan tugas-tugas fungsi pengawasan yang belum optimal	3.2.1	Belum tersedianya pedoman/ juknis tata laksana layanan tugas pengawasan Lembaga DPRD



No	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah	
(1)	(2)	(3)		(4)	
4.	Belum optimalnya pelayanan administrasi terhadap pelaksanaan tugas DPRD	4.1	Pelayanan administrasi terhadap pelaksanaan tugas DPRD yang tidak mencapai target dan tidak tepat waktu	4.1.1	Rendahnya kompetensi dan profesionalisme aparatur;
		4.2	Penyelenggaraan tata laksana layanan pelaksanaan tugas yang belum optimal	4.2.1	Belum tersedianya pedoman/ juknis tata laksana layanan pelaksanaan tugas DPRD
5.	Belum optimalnya pelayanan peningkatan kapasitas DPRD Provinsi Riau	5.1	Pelaksanaan bimtek, pelatihan, dan orientasi tidak sesuai jadwal yang ditetapkan	5.1.1	Kurangnya profesionalisme aparatur dalam memberikan pelayanan terhadap pelaksanaan bimtek, pelatihan dan orientasi.

3. Pilihan Langkah Strategis

- a. Langkah Strategis Kekuatan (*Strengths*) – Peluang (*Oppoturnities*)
 - 1) Penuhi tuntutan standar kinerja DPRD yang semakin tinggi melalui optimalisasi fungsi Sekretariat DPRD, pemanfaatan anggaran yang tersedia serta pemanfaatan perkembangan Iptek dan tenaga ahli.
 - 2) Manfaatkan hubungan harmonis dengan DPRD, peluang serta adanya tata tertib DPRD untuk mewujudkan pelayanan dan dukungan terhadap penyaluran aspirasi masyarakat secara prima.
- b. Langkah Strategis Kekuatan (*Strengths*) – Tantangan / Ancaman (*Threats*)
 - 1) Jadikan keberadaan Tata Tertib DPRD serta terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan anggota DPRD sebagai wahana untuk mengatasi masih seringnya campur tangan pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal dan untuk perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD;
 - 2) Optimalkan kedudukan Sekretariat DPRD yang strategis untuk mengantisipasi seringnya terjadi perubahan regulasi.
- c. Langkah Strategis Kelemahan (*Weaknesses*) – Peluang (*Oppoturnities*)



- 1) Tingkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - 2) Optimalkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan.
- d. Langkah Strategis Kekuatan (*Strengths*) – Kelemahan (*Weaknesses*)
- 1) Tingkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya;
 - 2) Optimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mengantisipasi hambatan- hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh.

4. Faktor- faktor Kunci keberhasilan

Faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical succes factors*) merupakan faktor-faktor yang sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan mencapai tujuan dan sasaran organisasi, dan bahkan perumusan tujuan organisasi haruslah memperhatikan keberadaan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut. Faktor-faktor kunci keberhasilan ini ditetapkan dengan terlebih dahulu dengan menganalisis lingkungan Strategis organisasi melalui pendekatan analisis SWOT/TOWS.

Dengan mempergunakan pendekatan analisis SWOT/TOWS terhadap faktor-faktor Strategis tersebut, maka dapat ditetapkan faktor-faktor kunci keberhasilan upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari Sekretariat DPRD Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi standar kinerja melalui pengembangan dan pembinaan aparatur serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Optimalisasi sarana dan prasarana yang tersedia;
- c. Perbaiki Standar Operasional Prosedur tugas-tugas sesuai agenda reformasi birokrasi dan penyiapan pengukuran kualitas pelayanan.



3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2019-2024 berdasarkan RPJMD Provinsi Riau yakni : **"Terwujudnya Riau Yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat Dan Unggul Di Indonesia (Riau Bersatu)"** Makna dari uraian visi tersebut adalah menempatkan masyarakat Provinsi Riau sebagai subyek dan sekaligus obyek pembangunan, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Riau berperan sebagai fasilitator dan dinamisator pembangunan.

Visi yang ditetapkan merupakan keinginan masyarakat Provinsi Riau yang memusatkan pada isu dan permasalahan utama daerah, sehingga pemerintahan dan pembangunan daerah dapat beroperasi dan terselenggara secara efektif, efisien dan berkelanjutan serta dapat terjamin eksistensi daerah di masa depan.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi RPJMD Provinsi Riau 2019 - 2024, sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
3. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing
4. Mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi

Seiring tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau yang merupakan unsur pemberian pelayanan dan dukungan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, maka dalam RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 merupakan salah satu Perangkat Daerah pelaksana Misi Kelima yaitu : **"Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi."** dengan tujuan "Meningkatkan Pelayanan Bagi Peningkatan Kinerja Lembaga DPRD Provinsi Riau" yang akan dilaksanakan melalui program-program pada Sekretariat DPRD Provinsi Riau, yaitu sebagai berikut :

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi



Adapun indikator kinerja utama terkait visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah nilai reformasi birokrasi, yang diukur melalui meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik. Dari uraian visi dan misi diatas, maka Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dirumuskan sebagaimana Tabel 3.2 dibawah ini :



Tabel 3.2.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Riau
Terhadap Pencapaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

Visi : *"Terwujudnya Riau Yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat Dan Unggul Di Indonesia (Riau Bersatu)"*
 Misi 5 : *"Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi."*

No	Misi Kepala Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.	1. Belum optimalnya pelayanan administrasi terhadap fungsi legislasi Lembaga DPRD; 2. Belum optimalnya pelayanan administrasi terhadap fungsi anggaran Lembaga DPRD; 3. Belum optimalnya pelayanan administrasi terhadap fungsi pengawasan Lembaga DPRD; 4. Belum optimalnya pelayanan administrasi terhadap pelaksanaan tugas DPRD; 5. Belum optimalnya pelayanan peningkatan kapasitas DPRD Provinsi Riau.	1. Rendahnya profesionalisme aparatur dalam pelayanan terhadap tugas-tugas Alat Kelengkapan DPRD; 2. Tidak adanya pedoman/juknis layanan tugas kelembagaan DPRD 3. Kurangnya ketersediaan teknologi informasi dan sarana pendukung pelayanan 4. Rendahnya motivasi aparatur dalam meningkatkan pelayanan kepada Lembaga DPRD 5. Kurangnya kapasitas aparatur dalam melayani pelaksanaan kegiatan	1. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata tertib Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau sebagai pedoman tugas pelayanan dan dukungan administratif bagi Sekretariat DPRD; 2. Adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik



No	Misi Kepala Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dapat dijadikan dasar dan acuan penyusunan rencana kinerja pelayanan Sekretariat DPRD; 3. Penerapan dan pengembangan SOP di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Riau sebagai pendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi.



3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra Sekretariat DPRD Kab/Kota

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau 2019-2024 baik secara langsung maupun tidak langsung tidak terkait dengan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Renstra Kabupaten/Kota, karena secara teknis tujuan dan sasaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau tidak berkaitan langsung dengan dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga dan Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan Daerah. Hal itu sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Riau. Sekretariat DPRD Provinsi Riau merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sekretariat DPRD Provinsi Riau dalam menjalankan pelayanan dan administrasi tugas-tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau tidak berkaitan dengan aspek rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis. Oleh karena itu Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau 2019-2024 baik secara langsung maupun tidak langsung belum melakukan identifikasi dampak strategis atas RTRW maupun KLHS.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dari uraian-uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa yang menjadi perhatian atau fokus utama dalam penentuan isu-isu strategis pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau adalah :

1. Meningkatnya tuntutan pemanfaatan teknologi informasi dan profesionalisme Aparatur Sekretariat DPRD dalam pencapaian kinerja DPRD;
2. Perlunya optimalisasi sarana dan prasarana yang tersedia untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD;
3. Belum tersedianya juknis/prosedur penyelenggaraan pelayanan tugas dan fungsi DPRD yang sesuai standar;



4. Semakin tingginya tuntutan peningkatan kualitas pelayanan yang dibebankan kepada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau guna peningkatan kapasitas Lembaga DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau harus melakukan berbagai upaya guna menghadapi isu-isu tersebut, diantaranya sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan administrasi legislasi, kehumasan, keprotokolan, dan keuangan;
2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan untuk pemantapan pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
3. Melakukan penyempurnaan pada sistim akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan Sekretariat DPRD;
4. Penerapan dan pengembangan standar/pedoman dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi;
5. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD yang handal dalam mengoptimalkan pelayanan terhadap Lembaga DPRD.



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi serta melaksanakan misi, dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah, rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun peta strategis pembangunan dan sebagai sarana dalam mengevaluasi capaian yang telah dilaksanakan. Perumusan tujuan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Riau ditempuh dengan menelaah arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD, dan isu-isu strategis yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Riau serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD menjadi landasan dalam perumusan tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Riau. Tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Provinsi Riau secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.1 dibawah ini:

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Provinsi Riau

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan Pelayanan Kepada Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau		Indeks Kepuasan Layanan (poin)	72	73	74	75	76
		1. Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Fungsi Legislasi Lembaga DPRD	Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Fungsi Legislasi Lembaga DPRD	91%	92%	93%	94%	95%
		2. Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Fungsi Anggaran Lembaga DPRD	Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan	91%	92%	93%	94%	95%



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Fungsi Anggaran Lembaga DPRD					
		3. Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Lembaga DPRD	Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Lembaga DPRD	91%	92%	93%	94%	95%
		4. Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Tugas DPRD	91%	92%	93%	94%	95%
		5. Meningkatnya Layanan Peningkatan Kapasitas DPRD Provinsi Riau	Persentase Layanan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang terfasilitasi	91%	92%	93%	94%	95%

4.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel 4.2 dibawah ini :

Tabel 4.2.
Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Provinsi Riau

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	RUMUSAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Pelayanan Kepada Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau	Indeks Kepuasan Layanan (poin)	Jumlah Nilai Kepuasan Layanan/Jumlah Anggota DPRD x 100%
2	Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Fungsi Legislasi Lembaga DPRD	Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Fungsi Legislasi Lembaga DPRD	Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Fungsi Legislasi Lembaga DPRD = (Jumlah Realisasi Layanan Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD / Jumlah Target Layanan Pelaksanaan Fungsi Legislasi Lembaga DPRD) x 100%



NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	RUMUSAN
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Fungsi Anggaran Lembaga DPRD	Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Fungsi Anggaran Lembaga DPRD	$\text{Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Fungsi Anggaran Lembaga DPRD} = (\text{Jumlah Realisasi Layanan Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPRD} / \text{Jumlah Target Layanan Pelaksanaan Fungsi Anggaran Lembaga DPRD}) \times 100\%$
4	Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Lembaga DPRD	Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Lembaga DPRD	$\text{Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Lembaga DPRD} = (\text{Jumlah Realisasi Layanan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD} / \text{Jumlah Target Layanan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Lembaga DPRD}) \times 100\%$
5	Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Tugas DPRD	$\text{Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Tugas DPRD} = (\text{Jumlah Realisasi Layanan Pelaksanaan Tugas DPRD} / \text{Jumlah Target Layanan Pelaksanaan Tugas DPRD}) \times 100\%$
6	Meningkatnya Layanan Peningkatan Kapasitas DPRD Provinsi Riau	Persentase Layanan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang terfasilitasi	$\text{Persentase Layanan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang terfasilitasi} = (\text{Jumlah Layanan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang dilaksanakan} / \text{Jumlah Layanan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang disediakan}) \times 100\%$



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan Tujuan dan Sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi perangkat daerah dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi perangkat daerah.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi perangkat daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Strategi dan Arah Kebijakan yang erat kaitannya dengan tugas Sekretariat DPRD Provinsi Riau dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, dapat dilihat dari Tabel 5.1 dibawah ini :



Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI	Terwujudnya Riau Yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat Dan Unggul Di Indonesia (Riau Bersatu)		
MISI	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Pelayanan Kepada Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau	1. Meningkatkan Layanan Pelaksanaan Fungsi Legislasi Lembaga DPRD	1.1 Meningkatkan pelayanan administrasi terhadap fungsi legislasi Lembaga DPRD Provinsi Riau;	1.1.1 Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur
		1.2 Meningkatkan tata laksana pelayanan pelaksanaan fungsi legislasi Lembaga DPRD Provinsi Riau.	1.2.1 Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan petunjuk teknis pelayanan pelaksanaan fungsi legislasi Lembaga DPRD Provinsi Riau.
	2. Meningkatkan Layanan Pelaksanaan Fungsi Anggaran Lembaga DPRD	2.1 Meningkatkan pelayanan administrasi terhadap fungsi anggaran Lembaga DPRD Provinsi Riau;	2.1.1 Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur
		2.2 Meningkatkan tata laksana pelayanan pelaksanaan fungsi anggaran Lembaga DPRD Provinsi Riau.	2.2.1 Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan petunjuk teknis pelayanan pelaksanaan fungsi anggaran Lembaga DPRD Provinsi Riau
	3. Meningkatkan Layanan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Lembaga DPRD	3.1 Meningkatkan pelayanan administrasi terhadap fungsi pengawasan Lembaga DPRD Provinsi Riau;	3.1.1 Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur



VISI	Terwujudnya Riau Yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat Dan Unggul Di Indonesia (Riau Bersatu)		
MISI	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	4. Meningkatkan Layanan Pelaksanaan Tugas DPRD 5. Meningkatkan Layanan Peningkatan Kapasitas DPRD Provinsi Riau	3.2 Meningkatkan tata laksana pelayanan pelaksanaan fungsi pengawasan Lembaga DPRD Provinsi Riau. 4.1 Meningkatkan pelayanan administrasi terhadap tugas DPRD Provinsi Riau; 4.2 Meningkatkan tata laksana pelayanan pelaksanaan tugas DPRD Provinsi Riau 5.1 Menyelenggarakan peningkatan kapasitas DPRD Provinsi Riau sesuai dengan perkembangan/ perubahan peraturan dan perundang-undangan	3.2.1 Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan petunjuk teknis pelayanan pelaksanaan fungsi pengawasan Lembaga DPRD Provinsi Riau 4.1.1 Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur 4.2.1 Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan petunjuk teknis pelayanan pelaksanaan tugas DPRD Provinsi Riau 5.1.1 Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam memberikan pelayanan terhadap pelaksanaan bimtek, pelatihan dan orientasi sesuai dengan perkembangan/ perubahan peraturan dan perundang-undangan



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.

Penetapan prioritas program Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau perlu diselaraskan dengan perkembangan makro ekonomi dan perkembangan kehidupan nasional secara umum. Sedangkan perkembangan kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau yang berkaitan dengan terwujudnya pelayanan yang sesuai standar terhadap tri fungsi DPRD (fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan), yang dijadikan landasan terhadap penyusunan prioritas program kerja. Karena itu perencanaan program yang akan dilaksanakan berdasarkan inventarisasi dan evaluasi dari program yang telah ada sebelumnya khususnya untuk memberikan penajaman, terdapat beberapa program yang masih perlu dilanjutkan, dikembangkan, bahkan diperluas cakupannya.

Dalam prioritas program yang akan dilaksanakan lebih bernuansa pada pemadatan program agar mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang berdampak atau memberi manfaat kepada pelayanan dan pemberian dukungan terhadap tugas pokok dan fungsi DPRD Provinsi Riau.

Memperhatikan permasalahan sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, maka pelayanan atas tugas pokok dan fungsi DPRD Provinsi Riau mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, khususnya agar dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan di Provinsi Riau, maka perlu ditentukan strategi dan kebijakan yang dituangkan ke dalam program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, yaitu sebagai berikut :

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program ini di maksudkan untuk meningkatkan kapasitas kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah melalui pelayanan Sekretariat DPRD dan fasilitasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau.

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini, antara lain :

1.1. Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD

- Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
- Pembahasan Rancangan Perda
- Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan



- Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik
- Penyusunan Tata Tertib DPRD
- 1.2. Pembahasan Kebijakan Anggaran
 - Pembahasan KUA dan PPAS
 - Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - Pembahasan APBD
 - Pembahasan Perubahan APBD
 - Pembahasan Laporan Semester
 - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
- 1.3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
 - Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
 - Pengawasan Penggunaan Anggaran
 - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepada Daerah
- 1.4. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
 - Penyusunan Kode Etik DPRD
 - Pengawasan Kode Etik DPRD
- 1.5. Peningkatan Kapasitas DPRD
 - Orientasi DPRD
 - Bimbingan Teknis DPRD
 - Publikasi dan Dokumentasi Dewan
 - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
 - Penyusunan Program Kerja DPRD
- 1.6. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 - Kunjungan Kerja Dalam Daerah
 - Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
 - Pelaksanaan Reses
- 1.7. Pembahasan Kerja Sama Daerah
 - Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah
 - Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
- 1.8. Fasilitasi Tugas DPRD



- Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
- Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
- Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
- Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Program ini dimaksudkan untuk terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran dalam rangka mendukung tugas-tugas kesekretariatan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan melalui program ini, antara lain :

2.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

2.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

2.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

2.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor



2.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Uruan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2.9. Fasilitas Keprotokolan

- Pengelolaan Hubungan Keprotokolan

2.10. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

- Penyelenggaraan Administrasi Keuangan
- Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
- Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

2.11. Layanan Administrasi DPRD

- Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dan direncanakan pelaksanaan dan pembiayaannya melalui APBD. Sejauh mungkin diidentifikasi pula berbagai program ataupun kegiatan yang merupakan peran serta aktif masyarakat sebagai tanggapan atas kebijakan ataupun program pemerintah, serta kinerjanya. Keberhasilan program dan kegiatan yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi. Dalam rangka itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan. Kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu untuk meyakinkan apakah kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan.

Mengingat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan secara spesifik diamanahkan pula dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan di Daerah maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau memandang penting adanya penganggaran responsif gender guna mengintegrasikan pengarusutamaan gender pada saat penyusunan rencana program dan kegiatan serta



pendanaan. Berikut kegiatan dan sub kegiatan yang termasuk ke dalam penganggaran responsif gender, antara lain :

1.1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

1.2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Berdasarkan rencana program yang tertuang pada Perubahan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024, maka Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024 dapat ditampilkan pada Tabel 6.1 yang tercantum pada lampiran.



Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat DPRD Provinsi Riau
Tahun 2019 – 2024

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatkan Pelayanan Kepada Lembaga DPRD Provinsi Riau				Indeks Kepuasan Layanan	72 Poin	72 Poin		73 Poin		74 Poin		75 Poin		76 Poin		76 Poin			
	Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lembaga DPRD Provinsi Riau			Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Tugas Lembaga DPRD Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Fungsi Legislasi Lembaga DPRD Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Fungsi Anggaran Lembaga DPRD Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Lembaga DPRD	0 Persen 0 Persen 0 Persen 0 Persen	0 Persen 0 Persen 0 Persen 0 Persen		92 Persen 92 Persen 92 Persen 92 Persen		93 Persen 93 Persen 93 Persen 93 Persen		94 Persen 94 Persen 94 Persen 94 Persen		95 Persen 95 Persen 95 Persen 95 Persen		95 Persen 95 Persen 95 Persen 95 Persen			
		4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase capaian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	0 Persen	0 Persen	-	92 Persen	238.270.437.093	93 Persen	152.259.792.400	100 Persen	145.322.539.198	100 Persen	146.322.539.198	100 Persen	682.175.307.889		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjab	Loka si
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	0 Perda	0 Perda	-	10 Perda	20.910.481.755	10 Perda	16.471.185.665	15 Perda	13.082.960.000	15 Perda	13.100.000.000	50 Perda	63.564.627.420	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4.02.02.1.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	0 Dokumen	0 Dokum en	-	10 Dokum en	4.419.703.655	10 Dokum en	4.419.999.670	10 Dokum en	4.500.000.000	10 Dokum en	4.500.000.000	40 Dokum en	17.839.703.325	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4.02.02.1.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	0 Dokumen	0 Dokum en	-	15 Dokum en	16.490.778.100	12 Dokum en	12.051.185.995	12 Dokum en	5.000.000.000	12 Dokum en	5.000.000.000	51 Dokum en	38.541.964.095	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4.02.02.1.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	0 Dokumen	0 Dokum en	-	0 Dokum en	-	0 Dokum en	-	12 Dokum en	1.482.960.000	12 Dokum en	1.500.000.000	24 Dokum en	2.982.960.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4.02.02.1.01.04	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	0 Dokumen	0 Dokum en	-	0 Dokum en	-	0 Dokum en	-	10 Dokum en	1.600.000.000	10 Dokum en	1.600.000.000	20 Dokum en	3.200.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4.02.02.1.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	0 Dokumen	0 Dokum en	-	0 Dokum en	-	0 Dokum en	-	5 Dokum en	500.000.000	5 Dokum en	500.000.000	10 Dokum en	1.000.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Pembahasan Kebijakan Anggaran	0 Perda	0 Perda	-	3 Perda	5.080.472.460	3 Perda	5.929.999.795	3 Perda	6.600.000.000	3 Perda	6.600.000.000	12 Perda	24.210.472.255	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4.02.02.1.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	0 Dokumen	0 Dokum en	-	0 Dokum en	-	0 Dokum en	-	2 Dokum en	1.100.000.000	2 Dokum en	1.100.000.000	4 Dokum en	2.200.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		4.02.02.1.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	0 Dokumen	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	2 Dokumen	1.100.000.000	2 Dokumen	1.100.000.000	4 Dokumen	2.200.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4.02.02.1.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	0 Dokumen	0 Dokumen	-	1 Dokumen	1.940.251.765	1 Dokumen	1.889.999.955	1 Dokumen	1.100.000.000	1 Dokumen	1.100.000.000	4 Dokumen	6.030.251.720	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4.02.02.1.02.04	Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	0 Dokumen	0 Dokumen	-	1 Dokumen	1.934.097.760	1 Dokumen	1.889.999.850	1 Dokumen	1.100.000.000	1 Dokumen	1.100.000.000	4 Dokumen	6.024.097.610	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4.02.02.1.02.05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	0 Dokumen	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	2 Dokumen	1.100.000.000	2 Dokumen	1.100.000.000	4 Dokumen	2.200.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4.02.02.1.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	0 Dokumen	0 Dokumen	-	1 Dokumen	1.206.122.935	1 Dokumen	2.149.999.990	1 Dokumen	1.100.000.000	1 Dokumen	1.100.000.000	4 Dokumen	5.556.122.925	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Jenis Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	0 Jenis	0 Jenis	-	2 Jenis	2.918.661.385	2 Jenis	2.767.899.590	8 Jenis	20.600.000.000	8 Jenis	20.600.000.000	20 Jenis	46.886.560.975	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4.02.02.1.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	0 Laporan	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	12 Laporan	3.250.000.000	12 Laporan	3.250.000.000	24 Laporan	6.500.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4.02.02.1.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	0 Laporan	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	12 Laporan	3.350.000.000	12 Laporan	3.350.000.000	24 Laporan	6.700.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		4.02.02.1.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	0 Laporan	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	12 Laporan	3.150.000.000	12 Laporan	3.150.000.000	24 Laporan	6.300.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4.02.02.1.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	0 Laporan	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	12 Laporan	3.050.000.000	12 Laporan	3.050.000.000	24 Laporan	6.100.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4.02.02.1.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	0 Laporan	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	12 Laporan	3.650.000.000	12 Laporan	3.650.000.000	24 Laporan	7.300.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4.02.02.1.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	0 Dokumen	0 Dokumen	-	1 Dokumen	1.347.385.715	1 Dokumen	1.319.999.950	1 Dokumen	1.350.000.000	1 Dokumen	1.350.000.000	4 Dokumen	5.367.385.665	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4.02.02.1.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	0 Dokumen	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	1.200.000.000	1 Dokumen	1.200.000.000	2 Dokumen	2.400.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4.02.02.1.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	-	1 Dokumen	1.571.275.670	1 Dokumen	1.447.899.640	1 Dokumen	1.600.000.000	1 Dokumen	1.600.000.000	4 Dokumen	6.219.175.310	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Jenis Peningkatan Kapasitas DPRD	0 Jenis	0 Jenis	-	5 Jenis	25.804.975.650	5 Jenis	14.978.424.610	5 Jenis	15.028.424.610	5 Jenis	15.871.384.610	20 Jenis	71.683.209.480	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		4.02.02.1.04.01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	0 Dokumen	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	1.142.960.000	2 Dokumen	1.442.960.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4.02.02.1.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	0 Dokumen	0 Dokumen	-	5 Dokumen	6.414.222.000	5 Dokumen	5.531.024.800	5 Dokumen	5.531.024.800	5 Dokumen	5.531.024.800	20 Dokumen	23.007.296.400	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4.02.02.1.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	0 Dokumen	0 Dokumen	-	12 Dokumen	9.123.425.000	12 Dokumen	2.183.399.810	12 Dokumen	2.183.399.810	12 Dokumen	2.183.399.810	48 Dokumen	15.673.624.430	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4.02.02.1.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	0 Orang	0 Orang	-	75 Orang	5.400.000.000	75 Orang	4.400.000.000	75 Orang	3.500.000.000	75 Orang	3.500.000.000	300 Orang	16.800.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4.02.02.1.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	0 Orang	0 Orang	-	8 Orang	864.000.000	8 Orang	864.000.000	8 Orang	864.000.000	8 Orang	864.000.000	32 Orang	3.456.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4.02.02.1.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	0 Dokumen	0 Dokumen	-	12 Dokumen	4.003.328.650	12 Dokumen	1.000.000.000	12 Dokumen	1.200.000.000	12 Dokumen	1.200.000.000	48 Dokumen	7.403.328.650	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4.02.02.1.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	0 Dokumen	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	1.450.000.000	1 Dokumen	1.450.000.000	3 Dokumen	3.900.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Jenis Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	0 Jenis	0 Jenis	-	3 Jenis	105.235.226.238	3 Jenis	53.898.999.600	3 Jenis	49.535.575.390	3 Jenis	49.535.575.390	12 Jenis	258.205.376.618	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		4.02.02.1.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	0 Laporan	0 Laporan	-	55 Laporan	44.000.521.838	55 Laporan	14.049.999.940	55 Laporan	9.686.575.730	55 Laporan	9.686.575.730	220 Laporan	77.423.673.238	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4.02.02.1.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	0 Dokumen	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	1.450.000.000	1 Dokumen	1.450.000.000	1 Dokumen	1.450.000.000	3 Dokumen	4.350.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4.02.02.1.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	0 Dokumen	0 Dokumen	-	3 Dokumen	61.234.704.400	3 Dokumen	38.398.999.660	3 Dokumen	38.398.999.660	3 Dokumen	38.398.999.660	12 Dokumen	176.431.703.380	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Jenis Pengawasan Kode Etik DPRD	0 Jenis	0 Jenis	-	0 Jenis	-	0 Jenis	-	1 Jenis	1.000.000.000	1 Jenis	1.000.000.000	2 Jenis	2.000.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4.02.02.1.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	0 Dokumen	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	500.000.000	2 Dokumen	1.000.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4.02.02.1.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	0 Laporan	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	500.000.000	2 Laporan	1.000.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4.02.02.1.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Jenis Pembahasan Kerja Sama Daerah	0 Jenis	0 Jenis	-	0 Jenis	-	0 Jenis	-	2 Jenis	1.870.000.000	2 Jenis	1.940.000.000	4 Jenis	3.810.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4.02.02.1.07.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	12 Dokumen	895.000.000	12 Dokumen	950.000.000	24 Dokumen	1.845.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungja wab	Loka si
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		4.02.02.1.07 .02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	0 Dokumen	0 Dokum en	-	0 Dokum en	-	0 Dokum en	-	12 Dokum en	975.000.000	12 Dokum en	990.000.000	24 Dokum en	1.965.000.00 0	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Jenis Fasilitasi Tugas DPRD	0 Jenis	0 Jenis	-	2 Jenis	78.320.619.6 05	2 Jenis	58.213.283.1 40	5 Jenis	37.605.579.1 98	5 Jenis	37.675.579.1 98	14 Jenis	211.815.061. 141	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4.02.02.1.08 .01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	0 Dokumen	0 Dokum en	-	148 Dokum en	61.127.447.6 05	148 Dokum en	49.903.671.2 50	148 Dokum en	23.388.539.1 98	148 Dokum en	23.458.539.1 98	592 Dokum en	157.878.197. 251	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4.02.02.1.08 .02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	0 Laporan	0 Lapora n	-	0 Lapora n	-	0 Lapora n	-	1 Lapora n	100.000.000	1 Lapora n	100.000.000	2 Lapora n	200.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4.02.02.1.08 .03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	0 Dokumen	0 Dokum en	-	0 Dokum en	-	0 Dokum en	-	1 Dokum en	2.200.000.00 0	1 Dokum en	2.200.000.00 0	2 Dokum en	4.400.000.00 0	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4.02.02.1.08 .04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	0 Dokumen	0 Dokum en	-	57 Dokum en	17.193.172.0 00	57 Dokum en	8.309.611.89 0	57 Dokum en	9.000.000.00 0	57 Dokum en	9.000.000.00 0	228 Dokum en	43.502.783.8 90	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4.02.02.1.08 .05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	0 Dokumen	0 Dokum en	-	0 Dokum en	-	0 Dokum en	-	1 Dokum en	2.917.040.00 0	1 Dokum en	2.917.040.00 0	2 Dokum en	5.834.080.00 0	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD	0 Persen	0 Persen	-	100 Persen	156.708.572. 996	100 Persen	125.662.066. 184	100 Persen	123.648.982. 520	100 Persen	125.677.460. 802	100 Persen	531.697.082. 502		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungja wab	Loka si
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.1.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Dokumen	0 Dokum en	-	0 Dokum en	-	0 Dokum en	-	6 Dokum en	1.125.000.00 0	6 Dokum en	1.125.000.00 0	12 Dokum en	2.250.000.00 0	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		X.XX.01.1.01 .01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0 Dokum en	-	0 Dokum en	-	0 Dokum en	-	2 Dokum en	125.000.000	2 Dokum en	125.000.000	4 Dokum en	250.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		X.XX.01.1.01 .02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	0 Dokumen	0 Dokum en	-	0 Dokum en	-	0 Dokum en	-	1 Dokum en	175.000.000	1 Dokum en	175.000.000	2 Dokum en	350.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		X.XX.01.1.01 .03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	0 Dokumen	0 Dokum en	-	0 Dokum en	-	0 Dokum en	-	1 Dokum en	175.000.000	1 Dokum en	175.000.000	2 Dokum en	350.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		X.XX.01.1.01 .04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	0 Dokumen	0 Dokum en	-	0 Dokum en	-	0 Dokum en	-	1 Dokum en	175.000.000	1 Dokum en	175.000.000	2 Dokum en	350.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		X.XX.01.1.01 .05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	0 Dokumen	0 Dokum en	-	0 Dokum en	-	0 Dokum en	-	1 Dokum en	175.000.000	1 Dokum en	175.000.000	2 Dokum en	350.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	2 Laporan	300.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	2 Laporan	300.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi	0 Laporan	0 Laporan	-	1 Laporan	25.362.132.28	1 Laporan	23.768.350.724	7 Laporan	25.068.350.724	7 Laporan	25.068.350.724	16 Laporan	99.267.184.400	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Bulan	0 Bulan	-	12 Bulan	25.362.132.28	12 Bulan	23.768.350.724	12 Bulan	24.768.350.724	12 Bulan	24.768.350.724	48 Bulan	98.667.184.400	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		X.XX.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	4 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	50.000.000	8 Dokumen	100.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		X.XX.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	2 Laporan	100.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0 Laporan	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	6 Laporan	100.000.000	6 Laporan	100.000.000	12 Laporan	200.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		X.XX.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	200.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola	0 Laporan	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	2 Laporan	450.000.000	2 Laporan	450.000.000	4 Laporan	900.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		X.XX.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	2 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	100.000.000	4 Dokumen	200.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		X.XX.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	2 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	100.000.000	4 Dokumen	200.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		X.XX.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0 Laporan	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	2 Laporan	200.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0 Lapora n	-	0 Lapora n	-	0 Lapora n	-	1 Lapora n	50.000.000	1 Lapora n	50.000.000	2 Lapora n	100.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		X.XX.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0 Lapora n	-	0 Lapora n	-	0 Lapora n	-	1 Lapora n	50.000.000	1 Lapora n	50.000.000	2 Lapora n	100.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		X.XX.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0 Lapora n	-	0 Lapora n	-	0 Lapora n	-	1 Lapora n	50.000.000	1 Lapora n	50.000.000	2 Lapora n	100.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi	0 Jenis	0 Jenis	-	1 Jenis	273.000.000	1 Jenis	273.000.000	2 Jenis	462.000.000	2 Jenis	501.000.000	6 Jenis	1.509.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0 Paket	-	2 Paket	273.000.000	2 Paket	273.000.000	2 Paket	312.000.000	2 Paket	351.000.000	8 Paket	1.209.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		X.XX.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	50 Orang	150.000.000	50 Orang	150.000.000	100 Orang	300.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di penuhi	0 Jenis	0 Jenis	-	6 Jenis	26.404.905.970	6 Jenis	13.704.789.445	10 Jenis	7.066.721.601	10 Jenis	8.086.721.601	32 Jenis	55.263.138.617	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	-	1 Paket	345.672.630	1 Paket	345.671.758	1 Paket	345.671.758	1 Paket	345.671.758	4 Paket	1.382.687.904	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	-	20 Paket	15.887.465.500	22 Paket	3.341.244.798	24 Paket	1.077.589.843	26 Paket	1.077.589.843	92 Paket	21.383.889.984	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		X.XX.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	-	10 Paket	200.000.000	11 Paket	220.000.000	21 Paket	420.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	-	1 Paket	6.025.720.000	1 Paket	7.109.460.000	1 Paket	2.409.460.000	1 Paket	3.409.460.000	4 Paket	18.954.100.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	-	1 Paket	1.238.969.220	1 Paket	649.999.889	1 Paket	449.000.000	1 Paket	449.000.000	4 Paket	2.786.969.109	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0 Dokumen	-	12 Dokumen	571.116.620	12 Dokumen	400.000.000	12 Dokumen	410.000.000	12 Dokumen	410.000.000	48 Dokumen	1.791.116.620	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		X.XX.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	2 Laporan	200.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0 Laporan	-	48 Laporan	2.335.962.000	48 Laporan	1.858.413.000	48 Laporan	1.950.000.000	48 Laporan	1.950.000.000	192 Laporan	8.094.375.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	75.000.000	2 Dokumen	150.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		X.XX.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	100.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	0 Jenis	0 Jenis	-	1 Jenis	8.845.782.800	3 Jenis	1.248.671.910	8 Jenis	11.950.000.000	8 Jenis	12.450.000.000	20 Jenis	34.494.454.710	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		X.XX.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	-	0 Unit	-	4 Unit	500.000.000	4 Unit	4.000.000.000	4 Unit	4.000.000.000	12 Unit	8.500.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		X.XX.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	-	0 Unit	-	13 Unit	500.000.000	13 Unit	5.200.000.000	13 Unit	5.200.000.000	39 Unit	10.900.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		X.XX.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	-	10 Paket	200.000.000	10 Paket	200.000.000	20 Paket	400.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	30 Unit	300.000.000	30 Unit	300.000.000	60 Unit	600.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		X.XX.01.1.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	2 Unit	100.000.000	2 Unit	100.000.000	4 Unit	200.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencana an	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungja wab	Loka si
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.1.07 .09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	2 Unit	500.000.000	2 Unit	500.000.000	4 Unit	1.000.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		X.XX.01.1.07 .10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	-	200 Unit	8.845.782.800	10 Unit	248.671.910	35 Unit	1.500.000.000	40 Unit	2.000.000.000	285 Unit	12.594.454.710	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		X.XX.01.1.07 .11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	15 Unit	150.000.000	15 Unit	150.000.000	30 Unit	300.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi	0 Jenis	0 Jenis	-	4 Jenis	13.702.772.088	4 Jenis	14.665.344.000	4 Jenis	7.350.000.000	4 Jenis	7.819.478.282	16 Jenis	43.537.594.370	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		X.XX.01.1.08 .01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0 Lapora n	-	275 Lapora n	100.477.000	275 Lapora n	60.000.000	275 Lapora n	70.000.000	275 Lapora n	70.000.000	1100 Lapora n	300.477.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		X.XX.01.1.08 .02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	0 Lapora n	-	52 Lapora n	3.507.649.600	52 Lapora n	3.600.000.000	52 Lapora n	1.600.000.000	52 Lapora n	1.600.000.000	208 Lapora n	10.307.649.600	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		X.XX.01.1.08 .03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Lapora n	-	5 Lapora n	659.850.000	5 Lapora n	100.000.000	5 Lapora n	100.000.000	5 Lapora n	100.000.000	20 Lapora n	959.850.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		X.XX.01.1.08 .04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Lapora n	-	12 Lapora n	9.434.795.488	12 Lapora n	10.905.344.000	12 Lapora n	5.580.000.000	12 Lapora n	6.049.478.282	48 Lapora n	31.969.617.700	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	0 Jenis	0 Jenis	-	4 Jenis	12.899.040.400	4 Jenis	5.614.486.000	7 Jenis	4.339.486.000	7 Jenis	4.339.486.000	22 Jenis	27.192.498.400	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		X.XX.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit	0 Unit	-	5 Unit	226.630.000	10 Unit	226.630.000	10 Unit	226.630.000	10 Unit	226.630.000	35 Unit	906.520.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	0 Unit	-	40 Unit	1.153.010.400	52 Unit	1.556.310.000	69 Unit	2.056.310.000	69 Unit	2.056.310.000	230 Unit	6.821.940.400	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		X.XX.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	30 Unit	50.000.000	30 Unit	50.000.000	60 Unit	100.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		X.XX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	25 Unit	50.000.000	25 Unit	50.000.000	50 Unit	100.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	-	5 Unit	10.626.380.000	5 Unit	3.081.546.000	5 Unit	1.081.546.000	5 Unit	1.081.546.000	20 Unit	15.871.018.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		X.XX.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	50 Unit	125.000.000	50 Unit	125.000.000	100 Unit	250.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	-	150 Unit	893.020.000	100 Unit	750.000.000	100 Unit	750.000.000	100 Unit	750.000.000	450 Unit	3.143.020.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		X.XX.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	Frekuensi Keprotokolan yang difasilitasi	0 Laporan	0 Laporan	-	260 Laporan	3.837.220.430	60 Laporan	999.999.910	0 Laporan	-	0 Laporan	-	320 Laporan	4.837.220.340	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		X.XX.01.1.14.03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	0 Laporan	0 Laporan	-	260 Laporan	3.837.220.430	60 Laporan	999.999.910	0 Laporan	-	0 Laporan	-	320 Laporan	4.837.220.340	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		X.XX.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang dilayani Keuangan dan Kesejahteraannya	0 Orang	0 Orang	-	65 Orang	62.743.719.080	65 Orang	62.747.424.195	65 Orang	62.747.424.195	65 Orang	62.747.424.195	260 Orang	250.985.991.665	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		X.XX.01.1.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	0 Bulan	0 Bulan	-	12 Bulan	61.002.424.425	12 Bulan	61.002.424.425	12 Bulan	61.002.424.425	12 Bulan	61.002.424.425	48 Bulan	244.009.697.700	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		X.XX.01.1.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	-	5 Paket	1.350.000.000	5 Paket	1.350.000.000	5 Paket	1.350.000.000	5 Paket	1.350.000.000	20 Paket	5.400.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		X.XX.01.1.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	0 Orang	0 Orang	-	65 Orang	391.294.655	65 Orang	394.999.770	65 Orang	394.999.770	65 Orang	394.999.770	260 Orang	1.576.293.965	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		X.XX.01.1.16	Layanan Adminstrasi DPRD	Jumlah Jenis Layanan Anggota DPRD yang dipenuhi	0 Jenis	0 Jenis	-	1 Jenis	2.640.000.000	1 Jenis	2.640.000.000	4 Jenis	3.090.000.000	4 Jenis	3.090.000.000	10 Jenis	11.460.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.1.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	0 Dokumen	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	10 Dokumen	50.000.000	10 Dokumen	50.000.000	20 Dokumen	100.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		X.XX.01.1.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	0 Laporan	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	8 Laporan	200.000.000	8 Laporan	200.000.000	16 Laporan	400.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		X.XX.01.1.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	0 Laporan	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	5 Laporan	200.000.000	5 Laporan	200.000.000	10 Laporan	400.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		X.XX.01.1.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	-	1 Paket	2.640.000.000	1 Paket	2.640.000.000	1 Paket	2.640.000.000	1 Paket	2.640.000.000	4 Paket	10.560.000.000	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	



Sebagaimana disebutkan pada Bab VI tabel 6.1 tentang rencana program dan kegiatan serta pendanaan, bahwa indikator sasaran di atas merupakan indikator yang ingin dicapai melalui program utama yaitu program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta program pendukungnya yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi.

Indikator program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang tercantum pada Perubahan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 adalah persentase capaian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Dengan kata lain, sinkronisasi indikator sasaran Sekretariat DPRD dan indikator program akan menunjukkan peningkatan kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Sedangkan pengukuran capaian indikator tujuan Sekretariat DPRD Provinsi Riau adalah “indeks kepuasan layanan” akan dilakukan dengan metode survey agar penilaian menjadi lebih objektif, serta akan ditingkatkan pada periode Renstra berikutnya. Dengan demikian rasio capaian indikator kinerja terhadap target yang ditetapkan pada tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Riau dapat menunjukkan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi sebagaimana yang dimaksud indikator sasaran *indeks reformasi birokrasi* pada RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024.

Selain itu Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau memandang penting adanya penganggaran responsif gender guna mengintegrasikan pengarusutamaan gender pada saat penyusunan rencana program dan kegiatan serta pendanaan



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Penetapan indikator kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Adapun Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Riau yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau yaitu *reformasi birokrasi* melalui strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan, Integritas Aparatur, serta Akuntabilitas dalam melayani tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau dengan indikator kinerja setiap tahunnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Riau yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Kepuasan Layanan (poin)	72	72	73	74	75	76	76
2	Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Fungsi Legislasi Lembaga DPRD	0	0	92	93	94	95	95
3	Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Fungsi Anggaran Lembaga DPRD	0	0	92	93	94	95	95
4	Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Lembaga DPRD	0	0	92	93	94	95	95
5	Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Tugas DPRD	0	0	92	93	94	95	95
6	Persentase Layanan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang terfasilitasi	91	91	92	93	94	95	95



BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 merupakan penyempurnaan penjabaran secara operasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sesuai dengan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 merupakan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pembiayaan yang akan digunakan dalam rangka merealisasikan program dan kegiatan dalam Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau. Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dalam pelaksanaan strategi dan kebijakan selama 5 tahun, pada prinsipnya untuk memperkuat Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024, yang dalam pelaksanaannya memperhatikan beberapa hal, yaitu sebagai berikut :

1. Keterikatan antara Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Provinsi Riau.
2. Konsistensi Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau guna mendukung suksesnya Program RPJMD Pemerintah Provinsi Riau.

Pekanbaru, Juli 2022

Plt. SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI RIAU,

JONI IRWAN, MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19630629 198910 1 001



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 719, Telp. (0761) 857122, 857166 Fax. (0761) 857141

PEKANBARU

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

Nomor : /KPTS/SEKR/DPRD/2021

Tentang

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 - 2024 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 serta efektifitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;

b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan berkompeten untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 11);
13. Peraturan Gubernur Riau Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau;
14. Peraturan Gubernur Riau Nomor 42 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 42);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-2024 SEKRETARIAT DPRD PROVINSI RIAU**
- PERTAMA : Mengesahkan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dengan susunan Tim sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 Sekretariat DPRD Provinsi Riau dimaksud dalam diktum ke satu keputusan ini, dapat melaksanakan tugas

secara penuh tanggung jawab dalam menyiapkan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 Sekretariat DPRD Provinsi Riau.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan/ kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : Januari 2021

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI RIAU,



MUHLIN, S.STP, M.AP
Pemimpin Muda
NIP. 19780222 199701 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR : /KPTS/SEKR/DPRD/2021
TANGGAL : Januari 2021

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-2024 SEKRETARIAT DPRD PROVINSI RIAU**

NO.	N A M A	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Muflihun, S.STP, M.AP	Sekretaris DPRD Provinsi Riau	Penanggung Jawab
2.	Irwan Suryadi	Kabag. Keuangan dan Perencanaan	Ketua
3.	Samto, S.STP, M.Si	Kabag. Persidangan dan Produk Hukum	Wakil Ketua
4.	T. Aznom Zaifani, SE, ME	Kabag. Umum	Sekretaris
5.	Ovan Rachamadano	Kasubbag Keuangan dan Perjalanan Dinas	Anggota
6.	Edwin Noviansyah, S.STP, M.Si	Kasubbag Verifikasi dan Pelaporan	Anggota
7.	Rio Armanda, S.Kom	Kasubbag Perencanaan	Anggota
8.	Yurikha Heriandanni, S.STP, M.Si	Kasubbag Komisi, Fraksi dan HAL	Anggota
9.	Wira Setiadi, S.STP, M.PA	Kasubbag Rapat dan Risalah	Anggota
10.	Reno Afriadi, SH	Kasubbag Produk Hukum	Anggota
11.	Tengku Rina Melati, S,Sos	Kasubbag Umum dan Protokol	Anggota
12.	Doddy Sukma, SE	Kasubbag Rumah Tangga, Perlengkapan dan PBMD	Anggota
13.	Raja Faisal Febnaldi, S.Sos	Kasubbag Humas dan Perpustakaan	Anggota
14.	Perdana Novalita, S.STP, M.Si	Staf Sub Bagian Perencanaan	Anggota
15.	Siska Fitriyani Syamsuddin, S.STP	Staf Sub Bagian Perencanaan	Anggota

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : Januari 2021

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI RIAU,



MUFLIHUN, S.STP, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19780222 199701 1 001

CASCADING SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

Tujuan Provinsi Riau Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel	Sasaran : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah					
	Indikator Kinerja Utama	2020	2021	2022	2023	2024
	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,51	2,55	2,99	3,37	3,56
Tujuan Sekretariat DPRD Provinsi Riau Meningkatkan pelayanan kepada Lembaga DPRD Provinsi Riau	Sasaran 1 : Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Fungsi Legislasi Lembaga DPRD					
	Indikator Kinerja Utama	2020	2021	2022	2023	2024
Indikator Tujuan Indeks Kepuasan Layanan (Poin) TAHUN 2020 : 72 TAHUN 2021 : 73 TAHUN 2022 : 74 TAHUN 2023 : 75 TAHUN 2024 : 76	Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Fungsi Legislasi Lembaga DPRD	91	92	93	94	95
	Sasaran 2 : Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Fungsi Anggaran Lembaga DPRD					
	Indikator Kinerja Utama	2020	2021	2022	2023	2024
	Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Fungsi Anggaran Lembaga DPRD	91	92	93	94	95
	Sasaran 3 : Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Lembaga DPRD					
	Indikator Kinerja Utama	2020	2021	2022	2023	2024
	Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Lembaga DPRD	91	92	93	94	95
	Sasaran 4 : Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Tugas DPRD					
	Indikator Kinerja Utama	2020	2021	2022	2023	2024
	Persentase Capaian Pelayanan Pelaksanaan Tugas DPRD	91	92	93	94	95
	Sasaran 5 : Meningkatnya Layanan Peningkatan Kapasitas DPRD Provinsi Riau					
	Indikator Kinerja Utama	2020	2021	2022	2023	2024
	Persentase Layanan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang terfasilitasi	91	92	93	94	95
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD						
Indikator		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Capaian Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		91	92	93	100	100

PENJABARAN POHON KINERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

